

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Geografi

UPTD Puskesmas Simbang Kabupaten Maros berlokasi di Homebase lama Dusun Bantimurung Desa Jenetaesa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros. Pada tahun 2007 puskesmas ini pertama kali dioprasionalkan dan menjadi puskesmas ke 14 (empat belas) di Kabupaten Maros. Puskesmas sekarang merupakan Gedung baru, dimana lokasi yang sebelumnya di dusun rumbia Desa Tanete Kabupaten Maros.

Jumlah kunjungan serta gedung yang tidak namun karena meningkatnya kunjungan serta rawan terhadap bencana alam banjir yang merupakan hal rutin tap tahunnya mengganggu aktivitas layanan puskesmas selanjutnya dengan banyaknya pertimbangan lain antara Puskesmas, Dinas Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Maros maka diputuskanlah lokasi puskesmas dipindahkan ke lokasi yang baru p dimulai sejak bulan oktober Tahun 2020 lalu.

UPTD Puskesmas Simbang Kabupaten Maros merupakan Puskesmas kategori pedesaan dengan kriteria Non Rawat Inap yang terletak pada daerah dataran rendah dengan luas wilayah 105,31 km mewilayahi 6 (enam) desa, yang terdiri dari 33 (puluh tiga) dusun dan Posyandu, dengan batas - batas wilayah sebagai berikut:

1. Batas wilayah UPTD Puskesmas Simbang Kabupaten Maros adalah :
 - a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Bantimurung
 - b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Tompobulu
 - c. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Cenrana
 - d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Turikale

Data wilayah UPTD Peskesmas Simbang Kabupaten Maros

Tabel 5.1

Data wilayah UPTD Puskesmas Simbang Kabupaten Maros
Sumber : Profil Puskesmas Simbang Kabupaten Maros Tahun 2022

No	Desa	Luas wilayah (KM ²)	Jarak Tempuh (KM ²)	Waktu Tempuh (Menit)
1.	Bontotallasa	7,56	7	25
2.	Tanete	12,02	5	20
3.	Simbang	12,36	4	15
4.	Jenetaesa	10,08	1	5
5.	Sambueja	19,67	2	10
6.	Samangki	43,62	5	30
	Total	105,31		

2. Data Fasilitas Sekolah dan Pelayanan

Data Fasilitas Sekolah dan Pelayanan UPTD Puskesmas Simbang
Kabupaten Maros

Sumber : profil Puskesmas Simbang Kabupaten Maros Tahun 2022

NO	DESA	JUMLAH SEKOLAH			JUMLAH FASILITAS KESEHATAN		
		SD/MI	SMP/MTS	SMA/MA	PUSTU	POS KES DES	BPS/ KLINIK SWASTA
1.	Bontotallasa	3	2	1	1	-	-
2.	Tanete	5	-	-	-	1	-
3.	Simbang	3	1	1	-	1	-
4.	Jenetaesa	4	1	2	-	1	1
5.	Sambueja	2	2	-	1	-	3
6.	Samangki	4	2	1	-	1	2
	Total	21	8	5	2	4	6

b. Demografi

Jumlah penduduk di wilayah kerja UPTD Puskesmas Simbang Kabupaten Maros, Pusdatin pada Tahun 2020 sebanyak 24.551 jiwa (5053 KK), Tahun 2021 sebanyak 24.655 jiwa (5074 KK) sedangkan pada Tahun 2022 sebanyak 25.918 jiwa. Data

tersebut didapatkan dari data Desa di wilayah kerja UPTD Puskesmas Simbang Kabupaten Maros. Berdasarkan data tersebut, Jumlah penduduk pada Tahun 2022 mengalami kenaikan dibanding ditahun sebelumnya.

Jumlah penduduk di Wilayah UPTD Puskesmas Simbang Kabupaten Maros sampai di Tahun 2022 masih sangat tinggi, hal ini bisa berpengaruh pada berbagai salah satunya sektor di bidang kesehatan maka dari itu di butuhkannya perhatian yang lebih seius. Maka dari itu perlu diketahui kelompok sasaran agar dapat menyusun perencanaan kesehatan dengan lebih baik.

c. Data Ketenagakerjaan

Sumber daya manusia adalah hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Maka dari itu UPTD Puskesmas Simbang Kabupaten Maros selalu berusaha untuk memenuhi yang dibutuhkan dengan melalui ajuan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Maros guna terpenuhinya sumber daya manusia secara kuantitas serta mengirim staf guna ikut dalam seminar atau pelatihan dan pelatihan - pelatihan baik secara internal maupun secara eksternal yang dilaksanakan oleh dinas kesehatan Provinsi Sulawesi selatan maupun oleh kementerian kesehatan.

Data SDM di puskesmas sudah diolah dalam aplikasi SDMK berbasis online untuk mempermudah perhitungan

kebutuhan tenaga, jenis pelatihan yang sudah diikuti, peningkatan pendidikan, data STR dan SIK berdasarkan profesi yang bersentuhan langsung dengan pasien pada khususnya maupun dimasyarakat pada umumnya. Berikut gambaran keadaan sumber daya manusia di UPTD Puskesmas Simbang Kabupaten Maros berdasarkan kualifikasi pendidikan :

Tabel 5.3
Keadaan Tenaga di UPTD Puskesmas Simbang Kabupaten Maros Tahun 2022
Sumber : Profil Puskesmas Simbang Kabupaten Maros Tahun 2022

No	Jenis tenaga	Jumlah	Status	Standar kebutuhan	Perhitungan analisis beban kerja	Keterangan
1	Dokter	3	3 PNS	2	2	Lebih 1
2	Dokter gigi	1	1 PNS	1	1	Sesuai
3	Perawat	43	10 PNS, 4 CPNS 29 NON ASN			
4	Bidan	40	9 PNS, 2 CPNS, 29 NON ASN			
5	Apoteker	2	1 PNS, 1 NON ASN	2	2	Sesuai
6	Asisten Apoteker	3	1 PNS, 2 NON ASN	3	3	Sesuai
7	Ahli Teknologi Laboratorium Medik/ ATLM	3	2 PNS, 1 NON ASN	3	3	Sesuai
8	Sanitarian/ Tenaga Kesling	5	3 PNS, 1 CPNS 1 NON ASN	3	3	Lebih 2
9	Tenaga Gizi	5	4 PNS, 1 NON ASN	5	5	Sesuai
10	Tenaga Kesehatan Masyarakat:					

	a.Promkes	2	2 PNS, 1 NON ASN	2	3	Kurang 1
	b.Epidemiologi	3	2 PNS, 1 NON ASN	2	2	Lebih 1
11	Perekam Medis	1	1 CPNS	1	1	Sesuai
12	Terapis Gigi dan Mulut	3	2 PNS, 1 NON ASN	2	2	Lebih 1
13	Pengelola Kepegawaian	1	1 PNS	2	2	Kurang 1
14	Pengadministراسي Umum	1	1 PNS	2	2	Kurang 1
15	Pengelola Barang/As et	0	-	2	2	Kurang 2
16	Bendahara /Staf Keuangan	1	1 NON ASN	3	3	Kurang 2
17	Sistem Informasi Kesehatan	1	1 NON ASN	3	3	Kurang 2
18	Supir Ambulance	2	1 PNS, 1 NON ASN	2	2	Sesuai
19	Kebersihan	0	-	3	3	Kurang 3
	Total	121	43 PNS, 9 CPNS, 69 NON ASN			

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pemilihan sumber data tergantung pada siapa yang diikutsertakan sebagai informan penelitian. Untuk memperoleh data yang akurat, peneliti menggunakan teknik purposive maka peneliti menggunakan teknik purposive atau peneliti secara sengaja atau sadar memilih informan dengan menentukan aspek-aspek yang

akan diwawancarai. Dimana peneliti menganggap informan tersebut sebagai orang yang paling mengetahui situasi dan keadaan objek dalam penelitian. Dalam hal ini yang dijadikan informan oleh peneliti, antara lain sebagai berikut:

Tabel 5.4
Karakteristik Informan

No	Kode Informan	Jabatan	Keterangan
1.	R	Kepala Puskesmas	Informan Kunci
2.	F.A	Penanggung Jawab Program	Informan Biasa
3.	M.N	Pelaksana Program	Informan Biasa
4.	M.A	Guru SD	Informan Pendukung
5.	R.D	Guru SD	Informan Pendukung
6.	R.A	Orang tua siswa	Informan Pendukung
7.	N	Orang tua siswa	Informan Pendukung

C. Hasil Penelitian

Program Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) merupakan kegiatan pemberian imunisasi tambahan campak-rubela serta kegiatan imunisasi pada anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Program Bulan Imunisasi Anak Nasional ini dapat melindungi anak Indonesia dari penyakit-penyakit yang dapat di cegah dengan imunisasi.

Program Bulan Imunisasi Anak Nasional bertujuan untuk Menghentikan penularan virus campak-rubela setempat (*indigenous*) di seluruh kabupaten/ kota di wilayah Indonesia pada tahun 2023, memperoleh sertifikasi eliminasi campak dan rubela/CRS pada tahun 2026 dari SEARO, mempertahankan Indonesia Bebas Polio dan mewujudkan eradikasi polio global pada tahun 2026, dan mengendalikan penyakit difteri dan pertusis.

Program Bulan Imunisasi Anak Nasional di selenggarakan di Indonesia dengan dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2022 bagi seluruh provinsi di pulau Kalimantan, Sumatera, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, Sulawesi. Tahap kedua dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2022 bagi provinsi di Provinsi Bali dan Pulau Jawa.

Sasaran Program Bulan Imunisasi Anak Nasional di Provinsi Sulawesi ialah anak usia 9 (sembilan) bulan sampai dengan kurang dari 12 (dua belas) tahun. Pada sasaran ini mendapatkan imunisasi tambahan campak-rubela.

Untuk mengimplementasikan Program Bulan Imunisasi Anak Nasional di Wilayah Kerja Puskesmas Simbang Kabupaten Maros maka peneliti menggunakan model implementasi Van Meter dan Van Horn, secara rinci variabel-variabel implementasi kebijakan dijelaskan sebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan dapat menentukan tercapainya keberhasilan tujuan dari implementasi Program Bulan Imunisasi Anak Nasional di wilayah Puskesmas Simbang dengan melihat indikator kinerja pelaksana dapat dinilai sejauh mana terealisasinya ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan.

a. Banyaknya kelompok sasaran yang telah di jangkau

MN selaku pelaksana Program Bulan Imunisasi Anak

Nasional ini mengatakan bahwa:

"kalau keterjangkauan dari program ini sudah terjangkau karna 21 sekolah yang di simbang sudah kami datangi semua."

(MN, 34 Tahun)

Dan FA selaku penanggung jawab program Bulan Imunisasi Anak Nasional mengatakan:

"iya sudah terjangkau karena semua sekolah yang ada di simbang kita datangi satu per satu"

(FA, 29 Tahun)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa jumlah kelompok sasaran pada program BIAN ini terjangkau yang dimana telah dilaksanakan imunisasi di seluruh sekolah dasar di wilayah Kerja Puskesmas Simbang.

b. Kemudahan pelayanan yang dapat di jangkau oleh kelompok sasaran

Menurut FA selaku penanggung jawab Program Bulan

Imunisasi Anak Nasional ini mengatakan bahwa:

“untuk kemudahannya dalam program BIAN ini sangat mudah karna kita semua pelaksananya yang datang ke sekolah-sekolah”

(FA, 29 Tahun)

Dan pernyataan dari MN selaku pelaksana program

mengatakan bahwa:

“Mudah dijangkau karna selain lokasinya yang dekat kita juga yang datangi semua sekolah yang ada di kecamatan Simbang.”

(MN, 34 Tahun)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pelayanan dalam program Bulan Imunisasi Anak Nasional ini di katakan sangat terjangkau karena lokasi atau wilayah dari sekolah dasar yang ada di wilayah kerja puskesmas simbang terjangkau dan para pelaksana yang mendatangi sekolah-sekolah dasar yang ada di wilayah kerja Puskesmas Simbang sehingga para siswa atau sasaran hanya menunggu di sekolah masing-masing.

- c. Kesesuaian keluaran kebijakan dengan yang dibutuhkan kelompok sasaran

FA selaku penanggung jawab Program Bulan Imunisasi

Anak Nasional ini mengatakan bahwa:

“Sesuai karna penurunan cakupan imunisasi turun waktu pandemi Covid-19 kemarin jadi harus kita imbangi dengan tambahan imunisasi ini”

(FA, 29 Tahun)

Dan di perkuat oleh pernyataan R selaku Kepala Puskesmas menyatakan bahwa:

“menurut saya pribadi keluaran kebijakan ini sangat di butuhkan oleh kelompok sasaran karena bisa kita lihat bahwa banyaknya anak yang tidak mendapat imunisasi lengkap saat adanya pandemi-19 ini.”

(R, 45 Tahun)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa keluaran kebijakan tersebut sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan kelompok sasaran karena adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan penurunan cakupan imunisasi yang signifikan. Maka dari itu dengan adanya kebijakan ini dapat mengejar cakupan imunisasi rutin yang menurun.

2. Sumber Daya

Sumber daya dalam proses implementasi merupakan salah satu faktor terpenting. Berhasilnya proses implementasi bergantung pada kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya. Sumber daya yang dimaksud dalam oleh Van Meter dan Van Horn (1975) adalah sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya sarana dan prasarana.

a. Ketersediaan SDM di Puskesmas Simbang dalam pelaksanaan program BIAN

FA Selaku dan Penanggung jawab Program Bulan Imunisasi Anak Nasional ini mengatakan bahwa:

“Untuk jumlahnya sudah cukup, mereka juga sudah jalankan tugasnya masing-masing”

(FA, 29 Tahun)

MN juga selaku pelaksana program mengatakan:

“SDM di Puskesmas ini sudah banyak sekali jadi bisa dibilang sangat cukup”

(MN, 34 Tahun)

Kemudian di perkuat dengan pernyataan R selaku

Kepala Puskesmas yang menyatakan bahwa:

“SDM di sini sudah sangat memadai dimana sudah banyaknya PNS-PNS dan Honorer-honorer yang bekerja di puskesmas ini. Dalam hal program BIAN ini kami menurunkan yang sesuai dengan bidang masing-masing”

(R, 45 Tahun)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa jumlah SDM dalam pelaksanaan program BIAN ini mencukupi selain itu juga pelaksana atau SDM telah menjalankan peran atau tugasnya masing-masing.

b. Kompetensi SDM yang melaksanakan program BIAN

Kompetensi petugas atau pelaksana adalah salah satu faktor terpenting dalam menentukan berhasilnya industri apapun itu termasuk dalam bidang kesehatan. Kompetensi merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang pekerja/karyawan guna dapat melakukan suatu jabatan ataupun pekerjaan secara efektif sesuai dengan visi dan misi organisasi atau perusahaan.

Mengenai kompetensi sumber daya manusia atau dalam hal ini FA selaku penanggung jawab program BIAN mengatakan bahwa:

“kita semua yang pelaksana rata-rata sudah lulusan sarjana semua jadi bisa dibilang memiliki kompetensi”

(FA, 29 Tahun)

Dan di dukung oleh R sebagai Kepala Puskesmas mengatakan bahwa:

“kompetensi dari para pelaksana telah sesuai dengan pelaksanaan program yang dimana ada lulusan bidan, perawat dan tenaga kesehatan lainnya.”

(R, 45 Tahun)

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa tidak adanya kendala di dalam sumber daya manusia karena para pelaksana program Bulan Imunisasi Anak Nasional ini sudah mempunyai kapabilitas serta kompetensi yang baik. Para pelaksana juga telah di tempatkan di kompetensi dan kapabilitas masing-masing.

c. Sumber pendanaan pada program BIAN

Di luar dari sumber daya manusia, sumber daya yang lainnya juga perlu diperhitungkan termasuk sumber daya finansial. Sumber daya finansial adalah salah satu hal penting dalam memastikan berhasil atau tidaknya suatu program, bahkan biasanya program membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk mendapatkan program yang berkualitas.

Dalam hal sumber daya FA selaku penanggung jawab Program Bulan Imunisasi Anak Nasional ini mengatakan bahwa:

“pendanaannya ada 2 dari BOK dan DAU”

(FA, 29 Tahun)

Dan di perkuat dengan pernyataan R selaku kepala Puskesmas mengatakan bahwa:

“Berbicara mengenai pendanaan pada program Bulan Imunisasi Anak Nasional ini kami ada dua yaitu dari BOK dan DAU.”

(R, 45 Tahun)

- Berdasarkan hasil wawancara di atas, kita dapat melihat bahwa pada program Bulan Imunisasi Anak Nasional ini telah mendapatkan dana atau anggaran yang bersumber dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Yang dimana sumber pendanaan ini dapat membantu berjalannya program Bulan Imunisasi Anak Nasional ini di wilayah Puskesmas Simbang Kabupaten Maros.
- d. Kesesuaian sumber dana yang diberikan dalam melaksanakan program BIAN

FA selaku penanggung jawab Program Bulan Imunisasi Anak Nasional ini mengatakan bahwa:

“ya sudah cukup untuk program ini”

(FA, 29 Tahun)

Dan MN selaku pelaksana program juga mengatakan:

"iya cukup dari 2 sumber tadi BOK sama DAU"

(MN, 34 Tahun)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dana yang diberikan dalam melaksanakan program Bulan Imunisasi Anak Nasional di wilayah Puskesmas Simbang sudah cukup untuk melaksanakan program.

- e. Memadainya sarana dan prasana dalam pelaksanaan program BIAN

MN selaku pelaksana Program Bulan Imunisasi Anak Nasional ini mengatakan bahwa:

"Sudah memadai, semua alatnya dengan vaksinnya sudah lengkap"

(MN, 34 Tahun)

FA selaku penanggung jawab program BIAN mengatakan:

"sarana dan prasarananya sudah memadai"

(FA, 29 Tahun)

Dan di perkuat oleh pernyataan R selaku Kepala Puskesmas mengatakan bahwa:

"terkait sarana dan prasarana dalam program Bulan Imunisasi Anak Nasional ini sudah cukup memadai dalam pelaksanaan baik itu dalam vaksinnya sendiri dan alat-alat medis lainnya"

(R, 45 Tahun)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana di Puskesmas Simbang

Kabupaten Maros sangat mendukung karena tidak adanya kendala dalam kebutuhan yang dibutuhkan terkait dengan sarana dan prasarana.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik pelaksana dalam organisasi dapat dilihat dari keseriusan implementor di lapangan yang melakukan segala sesuatu mulai dari penguatan berbagai sistem hingga merumuskan peraturan pendukung (*standar Operational Pelaksana*) agar pelaksana program dapat berjalan dengan efisien. Dalam hal ini, peneliti melihat keseriusan dalam pelaksanaan program Bulan Imunisasi Anak Nasional dengan sangat baik. Dalam melaksanakan program, para pelaksana harus mempunyai karakteristik pada aturan serta patuh pada sanksi hukum yang ada.

a. Kendala atau keluhan dari sasaran terhadap sikap petugas dalam melaksanakan program BIAN

FA selaku Informan biasa Program Bulan Imunisasi Anak Nasional ini mengatakan bahwa:

“Kendalanya biasa dari orang tua muridnya karna merasa takutki di imunisasi anaknya selebihnya tidak adaji keluhan”

(FA, 29 Tahun)

Dan di perkuat oleh pernyataan R selaku kepala Puskesmas mengatakan bahwa:

“Dalam kendala sendiri kami terkendala di sebagian orang tua tidak memberi izin untuk memberi imunisasi kepada anaknya karena merasa takut selanjutnya kami tidak ada keluhan dari sasaran terkait program BIAN ini.”

(R, 45 Tahun)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa terdapat kendala dalam program Bulan Imunisasi Anak Nasional di mana kendala tersebut ialah ada beberapa orang tua murid atau siswa tidak memberi izin kepada anaknya untuk mendapatkan imunisasi tambahan. Adapun alasan dari orang tua murid yang tidak memberikan izin kepadanya anaknya yaitu karena merasa takut jika ada efek samping dari imunisasi tambahan tersebut. Selain dari itu tidak terdapat keluhan dari sasaran program Bulan Imunisasi Anak Nasional ini.

Dan pernyataan dari RA orang tua siswa mengatakan bahwa:

“saya izinkan ji supaya kebalki juga daya tahan tubuhnya”

(RA, 33 Tahun)

Dan N selaku orang tua siswa juga mengatakan:

“setuju karna sebemnya itu dia ikut terus imunisasi”

(N, 28 Tahun)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa adanya dukungan orang tua dari salah satu kelompok sasaran yang dimana ia merasa bahwa program BIAN ini atau imunisasi

tambahan ini dapat membantu menambah kekebalan tubuh untuk kelompok sasaran.

- b. Sikap petugas atau pelaksana dalam peraturan/SOP yang dibuat dalam program BIAN

Mengenai peraturan/SOP yang dibuat dalam program BIAN ini MN selaku pelaksana program mengatakan bahwa:

“kita sebagai pelaksana mematuhi peraturannya karna nanti di takutkan terjadi masalah kalau tidak ikuti aturannya”

(MN, 34 Tahun)

Dan FA selaku penanggung jawab Program BIAN mengatakan bahwa:

“Ya, kita semua pelaksana sudah mematuhi SOPnya.”

(FA, 29 Tahun)

Dan R sebagai Kepala Puskesmas juga mengatakan bahwa:

“Untuk kepatuhan SOP dalam pelaksanaan program BIAN saya rasa itu suatu hal yang wajib untuk dipatuhi ini juga terkait dengan efek samping yang mungkin akan di timbulkan jika teman-teman tidak bekerja sesuai dengan SOP yang dijalankan.”

(R, 45 Tahun)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa sikap petugas atau pelaksana dalam menyikapi peraturan atau SOP itu adalah mereka sangat mematuhi SOP yang ada, karena para pelaksana mengatakan bahwa jika mereka tidak mematuhi SOP yang ada maka akan terjadi efek samping yang mungkin

akan terjadi atau akan terjadi masalah-masalah lain yang tidak diinginkan.

4. Sikap agen pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn, model yang telah dibahas harus disempurnakan dengan pandangan para praktisi di yuridiksi tempat kebijakan itu dibuat. Selanjutnya mengidentifikasi ada tiga elemen respons dalam pengimplementasian yang dapat mempengaruhi kemauan serta kemampuan pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan, yaitu: kognisi (komprehensif, pemahaman) mengenai kebijakan, jenis tanggapan (menerima, netral, menolak) dan intensitas dari tanggapan itu.

Mengenai pemahaman tentang kebijakan program BIAN MN selaku pelaksana program Bulan Imunisasi Anak Nasional mengatakan bahwa:

“iya di pahami”

(MN, 34 Tahun)

Dan FA selaku penanggung jawab program juga mengatakan :

“sudah dipahami”

(FA, 29 Tahun)

Terkaitu dengan tanggapan dan intensitas dari kebijakan ini FA penanggung jawab program Bulan Imunisasi Anak Nasional ini mengatakan bahwa:

“kadang-kadang kita juga pelaksana disini lemburki untuk kerja berkas-berkas sama yang lainnya”

(FA, 29 Tahun)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa agen pelaksana pada program Bulan Imunisasi Anak Nasional di Puskesmas Simbang telah mengetahui tentang kebijakan dari program BIAN ini baik itu dari maksud maupun tujuannya. Selain itu, agen pelaksana juga setuju dengan kebijakan terkait program BIAN ini. Pelaksana biasanya pulang lebih lama dibandingkan hari-hari biasanya karena adanya tugas yang harus diselesaikan. Hal ini menguatkan statement bahwa intensitas dukungan agen pelaksana pada program Bulan Imunisasi Anak Nasional cukup tinggi.

5. Komunikasi antar organisasi

Komunikasi merupakan salah satu elemen dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi program bulan imunisasi anak nasional. Efektifnya implementasi ketika mereka pembuat keputusan telah mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Komunikasi implementasi program harus dilakukan dengan baik, tepat, akurat dan konsisten kepada pihak terkait. Komunikasi ini dibutuhkan guna para implementor serta para pembuat kebijakan akan tetap konsisten dalam melaksanakan program yang akan ditetapkan pada sasaran program tersebut.

a. ketepatan komunikasi dengan para pelaksana program BIAN

Berdasarkan ketepatan komunikasi dengan para pelaksana MN selaku pelaksana program mengatakan:

“ketepatannya baik karna apa yang di sampaikan dengan teman teman yang lain bisa di mengrti”

(MN, 34 Tahun)

Dan FA selaku penanggung jawab program BIAN mengatakan:

“baik karna kita adakan rapat dulu untuk komunikasikan program ini”

(FA, 29 Tahun)

R selaku Kepala Puskesmas mengatakan bahwa:

“Kalau ketepatan komunikasi dek itu alhamdulillah sebelum diadakan kegiatan kita koordinasi dengan semua pengelola program dan teman-teman terkait untuk melaksanakan program BIAN ini di sekolah-sekolah.”

(R, 45 Tahun)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, komunikasi dilakukan dengan mengkoordinasi semua pengelola program dan semua agen pelaksana yang terlibat dalam program bulan imunisasi anak nasional ini. Hal ini di lakukan agar tidak adanya kesalahan pada saat turun lapangan nanti.

b. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program BIAN

MN selaku pelaksana Program Bulan Imunisasi Anak Nasional ini mengatakan bahwa:

“yang terlibat itu ada dari kita puskesmas simbang dengan semua SD yang ada di kecamatan simbang”

(MN, 34 Tahun)

Dan FA selaku penanggung jawab program juga mengatakan:

"iya semua sd sama puskesmas simbang ini"

(FA, 29 Tahun)

Dan R selaku kepala puskesmas mengatakan:

"jadi yang terlibat dalam program BIAN ini adalah kami dari UPTD Puskesmas Simbang dan semua sekolah dasar yang ada kecamatan di simbang ini."

(R, 45 Tahun)

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang terlibat dalam pelaksanaan program BIAN tersebut adalah UPTD Puskesmas Simbang dan sekolah dasar di wilayah kerja Puskesmas Simbang.

c. koordinasi dengan pihak-pihak terkait

MN selaku pelaksana program mengatakan:

"baik karna kita selalu mengirim surat dulu sebelum melakukan kegiatan"

(MN, 34 Tahun)

Dan R selaku kepala puskesmas mengatakan bahwa:

"terkait hal ini, ya kami telah melakukan koordinasi yang baik karena sebelum turun lapangan kami telah mengirim surat edaran kepada tiap-tiap sekolah dasar yang ada di wilayah kerja puskesmas Simbang"

(R, 45 Tahun)

MA selaku guru sekolah dasar dari program BIAN mengatakan bahwa:

"bagus karna selalu mengirim surat dulu baru kegiatan"

(MA, 49 Tahun)

RD juga selaku guru sekolah dasar mengatakan bahwa:

“koordinasinya sangat baik karna dari jauh hari mereka sudah kirim surat untuk kegitannya”

(RD, 35 Tahun)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa telah terjadi koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program bulan imunisasi anak nasional ini. Hal ini dikarenakan pihak dari puskesmas selalu mengirimkan surat kepada sekolah-sekolah dasar yang ada di wilayah kerja Puskesmas Simbang.

D. PEMBAHASAN

1. Ukuran dan tujuan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ukuran dan tujuan kebijakan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi program bulan imunisasi anak nasional, khususnya di Puskesmas Simbang Kabupaten Maros.

Adapun hasil penelitian yang didapatkan adalah Untuk jumlah kelompok sasaran telah terjangkau, dan dalam program

bulan imunisasi anak nasional sangat mudah dijangkau oleh kelompok sasaran karena selain dari jaraknya yang dekat para pelaksana yang datang ke sekolah sekolah dasar yang ada di kecamatan Simbang serta untuk keluaran kebijakan ini telah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran karena selama masa Covid-19 kemarin mengakibatkan adanya penurunan cakupan imunisasi yang cukup signifikan.

2. Sumber daya

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumber daya. Dalam suatu kebijakan mungkin tujuan yang di tetapkan sudah jelas dan logis, akan tetapi bukan hanya faktor tersebut yang dapat mempengaruhi dalam proses pengimplementasian suatu program, kan tetapi faktor sumber daya juga memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan sumber daya dalam menjalankan sebuah program merupakan salah satu faktor yang perlu di perhatikan. Sumberdaya yang salah satunya utama dalam implementasi program adalah sumberdaya manusianya (staf). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh manusianya yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementer saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan staf yang

cukup serta memiliki kemampuan yang sesuai untuk menjalankan program tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sumber daya manusia di pukesmas simbang sudah mencukupi karena standar SDM yang di butuhkan ada 8 pelaksana dan di puskesmas simbang sudah ada 9 pelaksana selain itu juga pelaksana atau SDM telah menjalankan peran atau tugasnya masing-masing. Untuk kapabilitas SDM di Puskesmas Simbang sudah mempunyai kapabilitas serta kompetensi yang baik. Para pelaksana juga telah di tempatkan di kompetensi dan kapabilitas masing-masing. . Serta telah mendapatkan dana atau anggaran yang bersumber dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Yang dimana sumber pendanaan ini telah cukup dan dapat membantu berjalannya program Bulan Imunisasi Anak Nasional ini di wilayah Puskesmas Simbang Kabupaten Maros. Sarana dan prasarana di Puskesmas Simbang Kabupaten Maros sangat mendukung karena tidak adanya kendala dalam kebutuhan yang dibutuhkan terkait dengan sarana dan prasarana.

3. Karakteristik agen pelaksana

Untuk faktor karakteristik organisasi pelaksana dilihat dari keseriusan para implementors di lapangan dalam melakukan serangkaian penguatan sistem hingga pembuatan peraturan

pendukung (*Standard Operational Procedure*) untuk pelaksanaan program agar berjalan dengan baik. Disini peneliti melihat keseriusan akan terlaksananya program pelayanan kesehatan gratis dengan baik dari ada tidaknya peraturan yang dibuat semenjak program ini diluncurkan. Dalam pengimplementasian suatu program, karakter dari para pelaksana kebijakan atau program harus berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta taat pada sanksi hukum yang berlaku. Kinerja implementasi program bulan imunisasi anak nasional akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan terdapat kendala yang dimana kendala tersebut ialah ada beberapa orang tua murid atau siswa tidak memberi izin kepada anaknya untuk mendapatkan imunisasi tambahan. Adapun alasan dari orang tua murid yang tidak memberikan izin kepadanya anaknya yaitu karena merasa takut jika ada efek samping dari imunisasi tambahan tersebut. Selain dari itu tidak terdapat keluhan dan orang tua lainnya meyetujui untuk anaknya mendapatkan imunisasi dalam program Bulan Imunisasi Anak Nasional ini. sikap petugas atau pelaksana dalam menyikapi peraturan atau SOP itu adalah mereka sangat mematuhi SOP yang ada, karena para pelaksana mengatakan bahwa jika mereka tidak mematuhi

SOP yang ada maka akan terjadi efek samping yang mungkin akan terjadi atau akan terjadi masalah-masalah lain yang tidak diinginkan.

4. Sikap atau kecenderungan para pelaksana

Disposisi yaitu berkaitan dengan bagaimana sikap dan komitmen pelaksana terhadap program. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Sikap para pelaksana dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Para pelaksana kebijakkan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsenkuensi-konsenkuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, hal ini berarti adanya dukungan dan kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang di buat oleh si pembuat kebijakan. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat

keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan semakin sulit. Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan agen pelaksana pada program Bulan Imunisasi Anak Nasional di Puskesmas Simbang telah mengetahui tentang kebijakan dari program BIAN ini baik itu dari maksud maupun tujuannya. Selain itu, agen pelaksana juga setuju dengan kebijakan terkait program BIAN ini. Pelaksana biasanya pulang lebih lama dibandingkan hari-hari biasanya karena adanya tugas yang harus diselesaikan. Hal ini menguatkan statement bahwa intensitas dukungan agen pelaksana pada program Bulan Imunisasi Anak Nasional cukup tinggi.

5. Komunikasi antar organisasi

Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan dalam keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, apabila pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan yaitu untuk ketepatan komunikasi dalam program bulan imunisasi anak nasional di puskesmas simbang komunikasi dilakukan dengan mengkoordinasi semua pengelola program dan semua agen pelaksana yang terlibat dalam program bulan imunisasi anak nasional ini. Hal ini dilakukan agar tidak adanya kesalahan pada saat turun lapangan nanti. Yang terlibat dalam pelaksanaan ini adalah UPTD Puskesmas Simbang dan sekolah dasar di wilayah kerja Puskesmas Simbang. Dan telah terjadi koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program bulan imunisasi anak nasional ini. Hal ini dikarenakan pihak dari puskesmas selalu mengirimkan surat kepada sekolah-sekolah dasar yang ada di wilayah kerja Puskesmas Simbang.